

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman. *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000.
- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: SinarGrafika, 2012.
- A. Hamid S Attamimi. *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta Kencana, 2005.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras, 2019.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang : Sinar Grafika, 2017.
- Arsana. *Manajemen pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, CV Budi Utama, 2016
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006.
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cet 1. Jakarta, 2009.
- Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari (Memahami dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2020.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya

- Bakti, 1994.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Juanda, Ogiandhafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- L.J. Van Apeldorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Cet. 16. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Cet. 2. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, Yogyakarta:Prima Print, 2014.
- Muhammad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 2015.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makasar: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.
- Novita Sari, *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Pusdatin, 2014.
- Philipus M. et al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Purnomo Edy Mulyono, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga, hlm.37.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 2007.
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali Pres, 1986.

- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2003.
- Sahya Anggara, *Hukum administrasi negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : Universitas Kristen Indonesia Press, 2006
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet. 6, Bandung: PT. Alumni, 2014
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Sri Hartini, et,al, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cet. 2. Bandung: PT Eresco, 1981.
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian_Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Yusuf Arianto, Agus, *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
4. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
6. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
8. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
10. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
11. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
14. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

C. JURNAL

1. Ateng Syafrudin.2000. *Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.
2. Grasia Kurniati, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1 No. 2, Juni 2017, hlm. 321-325.
4. ICW, Prinsip Dasar Kebijakan Dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta, Indonesian Procurement Watch, 2005, hlm. 5.
5. Julianda B. Manalu, Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 300.
6. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No.2, Maret, 2019.
7. LAN RI. 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara. Aceh Besar.
8. Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Media Hukum. Vol.24 No.2 Desember 2017. hlm. 152.
9. Niru Anita Sinaga, PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No.2, Maret 2019, hlm. 32.
10. Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.
11. Purnomo Edy Mulyono, Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pa da Pemerintah Kabupaten Gresik, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga JalanAirlangga, hlm.37.
12. Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Jure Humano, Volume I No. 1, 2009.
13. Shidarta, “*Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*”, Makalah disampaikan dalam Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Pusat Studi Hak

Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Hotel Grand Angkasa Medan, 2-5 Mei 2011, hlm. 3.

14. Wahyudi Kumorotomo, Jurnal Masalah Kelembagaan Dalam Reformasi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia.

D. INTERNET

1. https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUH_P diakses tanggal 7 Oktober 2022 jam 15.00 wib.
2. <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah.
4. *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>.)
5. No Name, Laporan Tahunan, Artikel dalam (<http://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id>), diakses pada tanggal 10 September 2022.
6. Mirhan Triandi, *Mendorong (Kembali) Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa*, Artikel dalam (<https://birokratmenulis.org/mendorong-kembali-lahirnya-undang-undang-pengadaan-barang-jasa/>), diakses tanggal 02 Januari 2023.
7. Prasetyo, Teguh *Pembaharuan Hukum: Teori Keadilan Bermartabat*, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=19&keywords =](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=19&keywords=), Diakses pada tanggal 4 April 2023